



Panji Serahkan Penjabaran APBD 2021



SERAHKAN - Bupati Melawi, Panji menyerahkan penjabaran APBD Melawi pada kepala OPD di Kantor Bupati Melawi, Rabu (6/1) siang. IST

NANGA PINOH, SP - Bupati Melawi, Panji menyerahkan secara resmi Perbup Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2021 ke Kepala OPD di Kantor Bupati Melawi, Rabu (6/1) siang.

Penyerahan penjabaran APBD menandai dimulainya pelaksanaan kegiatan dan program di seluruh SKPD.

Panji dalam arahannya mengatakan pasca penyerahan Penjabaran APBD

2021, seluruh kepala OPD untuk segera melaksanakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Melawi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.

"Setelah Perbup Penjabaran APBD tahun 2021 diterima, kami berharap untuk semua OPD segera ditindaklanjuti dengan tata kelola keuangan yang baik," harapnya.

Secara total ada 40 satuan kerja yang menerima Penjabaran APBD tersebut. Panji mengatakan penyerahan penjabaran APBD Melawi 2021 ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBD maupun APBN.

"Saya meminta OPD dapat melaksanakan semua program dan kegiatan dengan penuh rasa tanggung jawab, bersungguh-sungguh dengan senantiasa memegang teguh prinsip kehati-hatian, transparansi dan

akuntabilitas," ujarnya.

Panji turut meyakini, Pemkab Melawi bisa mempertahankan tata kelola keuangan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2020 seperti yang diraih tahun 2019.

Sementara itu, Kepala BPKAD Melawi, Abang Mangkota mengatakan, setelah Satker menerima DIPA APBD 2021, maka diminta kepada Pimpinan Satker untuk segera menugaskan bagian keuangan dan bendahara membuat ang-



garan kas, sehingga proses belanja yang dibutuhkan secepatnya bisa terealisasi.

"Hingga tutup buku APBD Melawi 2020 per 31 Desember 2020 hingga kini masih ada 16 OPD yang belum melakukan rekonsiliasi tutup buku APBD 2020 atau belum menyerahkan dokumen itu ke BPKAD," ungkapnya.

Dia berharap kepada 16 OPD yang belum menyerahkan dokumen tutup buku APBD Melawi 2020 tersebut segera diserahkan, karena dalam waktu dekat ini akan diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara, terkait isu tentang gaji 14 Pegawai Negeri Sipil didrop dari APBD tahun 2021 pasca evaluasi di Pemerintah Provinsi, Abang Mahkota membantah isu tersebut, menurutnya anggaran gaji 14 bukan didrop, tapi tertunda pembayarannya.

"Gaji 14 PNS itu tetap ada, kami tidak berani memutuskan sendiri, itu sudah dibahas bersama-sama dengan DPRD, tetap kita bayarkan, karena itu hak pegawai, tidak bisa tidak kita bayarkan, hanya tertunda pembayarannya," jelasnya. (eko)